

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI *STAKEHOLDERS* DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN

Oleh

Riny Handayani
gmriny@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang

ABSTRAK

Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013, terdapat penduduk sebesar 11.452.491 jiwa dibandingkan dengan sensus sebelumnya tahun 2000, penduduk Banten terdata tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang terdata tahun 2013 sebesar 2,27%. Sebagai pembandingan, wilayah lain di Indonesia hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% pertahunnya, akibatnya persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,48% pada tahun 2010. Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Kedua, Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Banten saja tapi diperlukan kerjasama antara BKKBN dengan *stakeholders* dan mitra kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yang menciptakan penduduk berkualitas sehingga akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Tugas utama BKKBN yang dalam hal ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah memprioritaskan pembangunan penduduk terutama untuk wilayah Banten bagian Selatan di Provinsi Banten dengan melibatkan *stakeholders* dan mitra kerja terkait.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Berwawasan Kependudukan

PENDAHULUAN

Program pembangunan mempunyai tujuan peningkatan taraf hidup penduduk, yaitu untuk meningkatkan kemampuan penduduk menuju kehidupan yang lengkap, produktif, dan memuaskan. Faktor yang dinilai menentukan keberhasilan setiap program pembangunan dan konsekuensi dari pembangunan yaitu penduduk karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan.

Keterkaitan kependudukan dengan permasalahan pembangunan, terutama pembangunan berkelanjutan adalah karena faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Hal ini kemudian akan ditentukan oleh kualitas penduduk sehingga *urgent* untuk dilakukan penyiapan generasi mendatang. Selain karena Pembangunan Kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, juga dikarenakan pembangunan SDM ini menjadi isu sentral dalam

pembangunan nasional. Pembangunan berwawasan kependudukan pada intinya mengandung arti pembangunan penduduk yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Salah satu misi BKKBN adalah mendorong *stakeholder* dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB. Melalui misi ini BKKBN berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas yang akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan yang relevan dengan pembangunan berwawasan kependudukan yang direncanakan.

Penduduk berkualitas merupakan salahsatu *issue* penting yang berkaitan dengan wacana pembangunan berwawasan

kependudukan terutama di Provinsi Banten ini. Ketimpangan kualitas penduduk berkaitan dengan pengaruh letak geografis dari masing-masing kabupaten/kota di provinsi ini. Berikut adalah Tabel Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality*

Rate (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) serta Tabel Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011.

Tabel 1. Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011.

Kabupaten/Kota	<i>Infant Mortality Rate</i> (IMR)	<i>Crude Death Rate</i> (CDR)
Pandeglang	34.12	3.77
Lebak	27.41	2.95
Tangerang	22.64	2.76
Serang	31.98	3.49
Kota Tangerang	20.96	2.89
Kota Cilegon	26.97	3.06
Kota Serang	32.17	3.64
Kota Tangerang Selatan	14.12	2.38

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012

Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011.

. Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Negeri	Rumah Sakit Swasta	Puskesmas (Unit)	Dokter (Orang)
Pandeglang	1	-	34	128
Lebak	2	1	35	134
Tangerang	1	14	40	847
Serang	1	2	38	119
Tangerang	2	16	25	838
Cilegon	1	4	8	319
Serang	1	4	10	147
Tangerang Selatan	1	18	24	665

Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012

Dari data di atas terlihat pola bahwa Angka Kematian Bayi / *Infant*

Mortality Rate (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate*

(CDR) berhubungan erat diantaranya dengan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Wilayah yang terletak di Banten bagian Selatan cenderung memiliki IMR dan CDR relatif tinggi dibanding di wilayah Utara, dan berkorelasi negatif dengan jumlah Rumah Sakit Swasta dan tenaga kesehatan yang tersedia.

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN

Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, yaitu (Priyono Tjiptoherijanto, 1999) pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk ; kedua,

pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Sedangkan definisi pembangunan berwawasan kependudukan juga diartikan oleh (Achmad Ghozali dalam Ananta, Arisdkk, 1995) adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi penduduk lokal dan diarahkan pada pemberdayaan dan pembinaan penduduk sehingga proses pembangunan dapat dipercepat dengan Sumber Daya Manusia lokal dan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menekankan pada dua aspek. Pertama, mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan terutama berkaitan dengan beberapa sektor

pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing. Kedua, mengandung makna adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi baik alam, sumber daya manusia maupun kondisi geografis yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan badan yang berperan secara dominan dan langsung mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia, kemudian untuk di tingkat daerah terdapat BKKBN provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) untuk tingkat kabupaten/kota. Salah satu misi yang tercantum dalam misi BKKBN adalah mendorong *stakeholder* dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga

bagai remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

Kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan *stakeholders* dan mitra kerja untuk tahun 2013 telah dilaksanakan dengan jumlah 68 mitra kerja yang memiliki potensi menyukseskan program BKKBN tersebut. Kerjasama ini bertujuan mengatasi hambatan dan permasalahan dalam menjalankan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, agar pelaksanaan program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana. Program andalan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang diarahkan lebih khusus pada pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk, tingginya angka kelahiran dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi.

Kepala BKKBN Pusat Prof. Dr. Fasli Jalal dalam Rapat Kerja Nasional 2014 menegaskan bahwa pada 2015,

BKKBN akan secara bertahap menjaring 6 juta mahasiswa untuk dijadikan agen atau konsultan bagi teman-temannya dalam persoalan ini. Diprediksi para mahasiswa ini ada di 3 ribu kampus dan akan dijadikan anggota pusat informasi konseling di sekolah-sekolah dan lingkungan mahasiswa. Sementara untuk menjangkau mereka yang tidak mendapatkan pendidikan formal, BKKBN akan merangkul Generasi Berencana (GenRe) dengan bantuan Karang Taruna.

Kaitannya kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten dengan *stakeholders* dan mitra kerja bertujuan untuk memperluas jaringan kerja sama, dengan mengajak sektor swasta untuk meningkatkan komitmen dalam mengembangkan program keluarga berencana dan kependudukan. Tujuan menjalin kerjasama antara BKKBN Provinsi Banten dengan *stakeholders* dan mitra kerjaitidak berbeda jauh dengan yang dilaksanakan oleh BKKBN Pusat yaitu membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas

yang diarahkan lebih khusus pada pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk, tingginya angka kelahiran dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi. Permasalahan kependudukan dan Keluarga Berencana tersebut memberi efek domino baik untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah karena berkaitan dengan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya, kerjasama yang dilakukan antara BKKBN dengan *stakeholders* dan mitra kerja tidak terlepas dari tujuan utama melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Beberapa fakta yang terjadi di Provinsi Banten berkaitan dengan pembangunan berwawasan kependudukan tidak terlalu jauh berkaitan dengan adanya kesenjangan atau *gap* antara wilayah Banten bagian Utara dengan bagian Selatan. Faktor geografis dalam hal ini berperan sehingga menyebabkan perbedaan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbedaan tersebut :

Tabel 3. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	LPP 1990-2000	LPP 2000-2010
Pandeglang	1,66	1,30
Lebak	1,66	1,58
Tangerang	4,20	3,80
Serang	2,88	1,44
Tangerang	3,70	3,12
Cilegon	2,70	2,44
Serang	-	2,88
Tangerang Selatan	-	4,63

Sumber: Banten Dalam Angka, Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat, angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Banten berdasarkan dua sensus terakhir (tahun 2000-2010) yaitu 3.1 persen per tahun dari hasil SP tahun 2000 dan sebesar 2.78 persen per tahun dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Secara umum terlihat polanya dalam sepuluh tahun terakhir, masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Dua kota yang baru terbentuk yaitu Serang dan Tangerang Selatan belum terbentuk polanya, namun Kota Tangerang Selatan langsung menunjukkan data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang langsung termasuk kategori

paling tinggi bahkan dibandingkan LPP kabupaten/kota lainnya.

Secara geografis terlihat, wilayah yang terletak di Banten bagian Utara dalam hal ini Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) terlihat memiliki Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang mendominasi dibandingkan wilayah yang terletak di Banten bagian Selatan, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

Jumlah fasilitas kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit (negeri dan swasta), Puskesmas dan Dokter di masing-masing kabupaten/kota berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek Fertilitas dan Mortalitas di

Provinsi Banten. Tabel 2 di bawah ini memberikan informasi tentang jumlah fasilitas kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit (negeri dan swasta),

Puskesmas dan Dokter di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Tabel 4. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Negeri dan Swasta), Puskesmas dan Dokter di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Negeri	Rumah Sakit Swasta	Puskesmas (Unit)	Dokter (Orang)
Pandeglang	1	-	34	128
Lebak	2	1	35	134
Tangerang	1	14	40	847
Serang	1	2	38	119
Tangerang	2	16	25	838
Cilegon	1	4	8	319
Serang	1	4	10	147
Tangerang Selatan	1	18	24	665

Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012

Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality Rate* (IMR) paling tinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang, masing-masing sebesar 34.12 dan 32.17. Wilayah yang paling rendah Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 14.12. Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) paling tinggi juga terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang, masing-masing sebesar 3.77 dan 3.64. Wilayah yang

paling rendah Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 2.38

Dari data di atas terlihat pola bahwa Angka Kematian Bayi / *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate* (CDR) berhubungan erat diantaranya dengan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Secara geografis juga dapat terlihat wilayah yang memiliki kerentanan masalah kependudukan adalah

wilayah yang terletak di Banten bagian Selatan dibanding wilayah yang terletak di Banten Bagian Utara.

Di Tabel 3 terlihat pula persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2012

Kabupaten/Kota	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Pandeglang	12,55	12,01	11,14
Lebak	12,05	10,63	10,38
Tangerang	7,41	6,55	7,18
Serang	6,48	5,80	6,34
Tangerang	6,83	6,42	6,88
Cilegon	3,95	4,14	4,46
Serang	-	6,19	7,03
Tangerang Selatan	-	-	1,67

Sumber : Banten Dalam Angka, 2012

Dari tabel di atas lagi-lagi terlihat adanya kesenjangan jumlah penduduk miskin antara penduduk di Banten bagian Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) yang terdata paling tinggi dan Utara (Kota Tangerang Selatan) paling sedikit memiliki jumlah penduduk miskinnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pembangunan berwawasan kependudukan menurut pada strategi pembangunan yang bersifat *'bottom-up planning'*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan

penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan *'bottom-up'* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Secara umum, program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan keadaan kependudukan di Provinsi Banten terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012. Lebih spesifik program dan kegiatan ini dapat

dilihat dalam Program / Kegiatan Provinsi Banten Dalam Merespon Program Millenium Development

Goals (MDGs). Tabel 1 menampilkan detail program dan kegiatan yang dimaksud :

Tabel 6. Program / Kegiatan Provinsi Banten Dalam Merespon Program MDGs

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)	PROGRAM DALAM RPJMD BANTEN 2012-2017
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin
2	Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Menurunkan angka kematian anak	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5	Meningkatkan kesehatan ibu	Kependudukan dan Keluarga Berencana
6	Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya	Rehabilitasi Sosial
7	Memastikan kelestarian lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
8	Mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan	Peningkatan Iklim Investasi

Sumber : RPJMD Provinsi Banten, 2012

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan BKKBN Provinsi dalam rangka menjalin kerjasama antara *stakeholders* dan mitra kerja kaitannya dengan pembangunan berwawasan kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Memberi prioritas pembangunan kependudukan di wilayah Banten bagian Selatan dari Provinsi Banten dengan menggandeng *stakeholders* dan mitra kerja terkait.
- b. Adanya potensi wilayah yang berbeda antar wilayah menyebabkan peran Pemerintah Pusat sebagai ‘Pengatur Kebijakan Pembangunan Nasional’ tetap diperlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan dan keserasian antar wilayah.
- c. Mengundang dan meminta masukan pendapat dari *stakeholders* dan mitra kerja (BKKBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, BPS, Tokoh Agama, Pusat Kajian Kependudukan dari Perguruan Tinggi, Koalisi Kependudukan, Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan instansi terkait lainnya) dalam

perumusan desain dan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten .

- d. Membentuk PPKS (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga). Dengan tujuan menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat yang memiliki berbagai persoalan yang terkait dengan kesejahteraan keluarga.
- e. Membentuk agen atau konsultan yang terdiri dari mahasiswa di kampus dan akan dijadikan anggota pusat informasi konseling di sekolah-sekolah dan lingkungan mahasiswa. Sementara untuk menjangkau mereka yang tidak mendapatkan pendidikan formal, dapat meminta bantuan Karang Taruna.
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BKKBD secara berkelanjutan baik melalui program Gelar maupun Non Gelar (program sertifikat maupun *loose courses*).
- g. Peningkatan pengembangan kerjasama kelembagaan dan pembinaan pusat-pusat penelitian

dan pengkajian kependudukan dengan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995, **“Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”** dalam buku: Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan, editor Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data dan Angka Keadaan Kependudukan Provinsi Banten. 2012. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten
- Badan Pusat Statistik. 2013. Banten Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
- Prijono Tjiptoherijanto, 1999, *Economic Crisis and Recovery: The Indonesia’s Case*, makalah disampaikan pada “The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses”, Manila, Philippines, 28-29 January 1999
- Profil Provinsi Banten. <http://www.bantenprov.go.id/gov/?link=dtl&id=705>
- RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017